

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN LUWU

Murisna¹, Samsul Bachri², A. Dahri Adi Patra Ls.³

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo

ABSTRAK

Penelitian ini tentang penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar di kabupaten Luwu yang terdiri dari: SD Negeri 60 Ponrang, SD Negeri 62 Lare-Lare, SD Negeri 21 Taddette, SD Negeri 65 Bua, SD Negeri 22 Belopa, SD Negeri 229 Lamunre, SD Negeri 231 Padang Assompereng, SD Negeri 25 Radda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru dan staf tata usaha serta komite sekolah.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu. Hal tersebut dapat dilihat pada pengujian statistik yaitu uji parsial (uji t), hasil dari T_{hitung} sebesar 3,692 dan T_{tabel} sebesar 1,654 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan kriteria pengujian jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hasilnya mempunyai pengaruh positif dan signifikan penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu. Hasil analisis regresi linear sederhana yaitu $Y = 27,368 + 0,361 X$. Dari hasil persamaan tersebut diketahui koefisien regresi *good corporate governance* memiliki tanda yang positif sehingga memiliki hubungan yang positif antara *good corporate governance* dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu. Kemudian nilai *R Square* sebesar 0,089 yang artinya sebesar 8,9% pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di pengaruhi oleh penerapan *good corporate governance*, dan 91,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Good corporate governance*, Pengelolaan dana BOS

1. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia yaitu dengan menguatnya tuntutan sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) terhadap lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah khususnya dalam sektor pendidikan. Dengan munculnya semangat demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam aspek kehidupan merupakan cerminan dari reformasi di Indonesia.

Gerakan reformasi membawa keuntungan bagi masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dibutuhkan praktek dalam kerangka politik dan sosial, Wanyaman dan Burton (2009) dalam Fauzan (2014). Di bidang pendidikan terdapat hubungan erat antara sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dengan akuntabilitas publik.

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan masyarakat luas. Dana bantuan operasional sekolah

(BOS) merupakan hak bagi setiap siswa yang disalurkan oleh pemerintah melalui sekolah untuk mendanai biaya operasional kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi, dan keadilan.

Dengan adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan biaya pendidikan yang dikelola secara transparan kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan baik sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana maupun dengan sumber belajar siswa.

Namun dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terkadang penyimpangan masih saja sering terjadi. Menurut penelitian Indonesia *corruption watch* (ICW) oleh Febri Diansyah dalam (Fauzan, 2014), secara nasional dengan sampel sekolah 3.237 pada 33 provinsi ditemukan nilai penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) lebih kurang Rp. 28 miliar. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau 63,5% dari total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kerugian negara dalam kasus ini lebih kurang sebesar Rp. 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, selain itu transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban belum diterapkan secara maksimal di sekolah.

Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu kurangnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima oleh beberapa sekolah, kurangnya

kemampuan guru menjadi bendahara dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS), pihak sekolah kurang tepat waktu dalam memberikan laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah diketahui oleh masyarakat (Kaswandi, 2015). Untuk itu pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) perlu adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Hasil penelitian yang mengkaji topik tentang penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang menghasilkan adanya temuan dari hasil penelitian yang berbeda atau *gaap* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2014) bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan menurut May Nurhidayah dan Sarsiti (2017) bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan pendekatan teori alternatif dalam *good corporate governance* dimana manajer dianggap sebagai orang-orang yang berfikir kolektif dan pro organisasi. Manajer diasumsikan sebagai *steward*/pelayan/agen. Dalam teori ini, menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi untuk kepentingan individu melainkan untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepadanya demi mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gudono (2017:155) teori *stewardship* (teori pengelolaan) adalah cara menciptakan struktur organisasi yang bisa membantu manajer untuk

membuat keputusan serta pilihan-pilihan tindakan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Teori ini menekankan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik serta tujuan utama *corporate governance* untuk menentukan mekanisme dan struktur yang memfasilitasi koordinasi yang efektif yang dapat dibentuk oleh kedua pihak dan asumsi yang harus digaris bawahi dalam teori ini adalah tingkah laku manajer sejalan dengan pemilik atau *stakeholder*.

Good Corporate Governance

Konsep *good corporate governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Definisi *Good Corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Peraturan Menteri BUMN, 2011).

OECD (*The Organization for Economic Corporation and Development*) dalam Sutojo dan Aldridge (2019:2) mengemukakan *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham. *Good corporate* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dewan pengurus *board of directors* dan direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

Menurut Sulistyanto (2008:9) *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.

Menurut Sohib (2016:29) *good corporate governance* merupakan:

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi RUPS dan para *stakeholder* lainnya.

- b. Suatu sistem *check and balance* mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang dapat mengatur dan mengelola suatu kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governnce

Untuk mewujudkan konsep dan penerapan *good corporate governance* yang efektif dan efisien, ada lima prinsip yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri BUMN yaitu:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*) adalah keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan menyediakan informasi terbuka, jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting oleh *stakeholders*.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dalam memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada *stakeholders*, terhadap hasil pencapaian perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam konsep ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk

bertanggungjawab terhadap *stakeholders* internal saja, tetapi juga bertanggungjawab kepada *stakeholders* eksternal.

4. Kemandirian (*Independency*), adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Konsep ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai-nilai (*values*) agar dapat menciptakan daya saing.
5. Kesetaraan/Kewajaran (*Fairness*), adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka memenuhi hak-hak *stakeholder* yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak para pemangku kepentingan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada sekolah-sekolah. Bantuan tersebut di kelola oleh sekolah guna membiayai operasional sekolah agar biaya operasional tersebut tidak dibebankan pada siswa.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Secara khusus bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang

orangtua/walinya tidak mampu pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat, (permendikbud,2019).

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam dapodik. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional, (permendikbud, 2019). Penelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari: a) Perencanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). b) Penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). c) Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). d) Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). e) Pelaporan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan atau observasi langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dewan guru, staf dan komites sekolah pada Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.

4. ANALISIS DATA

Hasil Analisis Data

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Model regresi linear sederhana menggambarkan pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Secara umum rumus persamaan regresi linear sederhana adalah $Y = a + bx + e$. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah diolah ke dalam model perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18 Regresi linear sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.368	4.017		6.812	.000
GCG	.361	.091	.298	3.960	.000

a. *Dependent Variable:* Dana BOS

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh koefisien untuk variabel bebas yaitu 0,361 dengan konstanta sebesar 27,368. Sehingga dapat dibuat hasil model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 27,368 + 0,361 X$$

Interpretasi model tersebut di atas, yaitu:

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 27,368, artinya apabila GCG (X) nilainya sama dengan nol maka pengelolaan dana BOS nilainya sebesar 27,368.
 - b. Nilai koefisien GCG (b) sebesar 0,361. Artinya, setiap ada kenaikan variabel GCG (X) sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pengelolaan dana BOS sebesar 0,361.
- b. Pengaruh X Terhadap Y Secara Parsial (Uji t)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independent yaitu *good corporate governance* (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu dana BOS (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5%. adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.

2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji.

Tabel 4.19 Hasil Uji parsial (uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.368	4.017		6.812	.000
GCG	.361	.091	.298	3.960	.000

a. *Dependent Variable:* Dana BOS (*t tabel = 1,654)

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai t hitung GCG adalah 3,960. Sedangkan untuk menentukan nilai t tabel pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel t yang sudah ada. Df adalah hasil pengurangan jumlah data dikurangi jumlah variabel penelitian ($163-2 = 161$). Nilai signifikan pada $\alpha=5\%$, sehingga taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Selanjutnya tentukan nilai t tabel dengan melihat tabel t. Pada penelitian ini nilai signifikansi 0,05 dan Df adalah 161, sehingga diperoleh nilai t tabel adalah 1,654.

Nilai t-hitung $GCG > t\text{-tabel}$ ($3,960 > 1,692$), dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel penerapan GCG signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tingkat kepercayaan 95%.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila koefisien determinasi $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali ($= 0\%$) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi $R^2 = 1$, berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas.

Letak R^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq R^2 \leq 1$. Besarnya koefisien determinasi variabel terikat dapat diketahui dari skor tabel *coefficient*. secara parsial variabel bebas terhadap atau kuadrat *partial correlation* dari Koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. “Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat”(Ghozali, 2009).

Tabel 4.20 Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.298 ^a	.089	.083	3.210

Predictors: (Constant), GCG

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,298 yang berarti korelasi atau hubungan antara penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mempunyai hubungan yang erat/kuat sebesar 29,8% karena memiliki koefisien korelasi di atas 0,5. *R-Square* adalah 0,089 atau 8,9% yang berarti variabel penerapan *good corporate governance* (GCG) mampu menjelaskan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar 8,9%, sedangkan sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

A. Pembahasan

Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

Hal tersebut dapat dilihat pada pengujian statistik yaitu uji parsial (uji t), hasil dari T_{hitung} sebesar 3,692 dan T_{tabel} sebesar 1,654 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan kriteria pengujian jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hasilnya penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

Kemudian pada pengujian statistik melalui uji regresi linear sederhana yaitu a = angka kostan *unstandardized coefficients* nilainya sebesar 27,368 dan b = angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,361. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat penerapan *good corporate governance* (X) maka akan meningkatkan pengelolaan dana BOS (Y) sebesar 0,361. Serta nilai *R Square* sebesar 0,089 yang artinya sebesar 8,9% pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di pengaruhi oleh penerapan *good corporate governance*, dan 91,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dasar di kabupaten Luwu telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan beberapa indikator yang digunakan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara lain perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pelaporan dapat dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik maka pihak sekolah harus didukung penerapan dari *good corporate governance* dengan prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini senantiasa perlu ditingkatkan karena semakin tinggi penerapan *good corporate governance*, maka semakin tinggi tingkat pengelolaan dana BOS.

Salah satu tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi atau instansi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pengetahuan warga sekolah tentang *good corporate governance* (GCG) yaitu dengan melakukan sosialisasi, seminar, dan *workshop* secara

berkala mengenai penerapan *good corporate governance* (GCG) secara efektif dan efisien sesuai dengan standar dan peraturan yang ada. Dengan dilakukannya upaya tersebut, warga sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan sistem *good corporate governance* (GCG) tersebut. Selain itu setiap sekolah dasar di kabupaten Luwu perlu melakukan *self-assesment* atau evaluasi internal sekolah secara berkala tentang penerapan *good corporate governance* (GCG). Pihak eksternal juga perlu mengetahui penerapan *good corporate governance* (GCG) dilakukan oleh pihak sekolah secara efektif dan efisien. Evaluasi internal sekolah perlu dilakukan secara periodik setiap tahunnya, sehingga fluktuasi, situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang senantiasa berubah dapat ditanggapi oleh pihak sekolah secara tepat.

5. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang harus dipertimbangkan oleh pihak sekolah antara lain:

1. Dalam penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), pihak pemerintah perlu meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu agar semakin baik kedepannya.
2. Pihak sekolah perlu melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar kedepannya pengelolaannya semakin baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel yang belum di cantumkan dalam penelitian ini dan pengukuran yang lebih lengkap dan beragam.

Daftar Rujukan

- Akbar, M. F. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah: Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* 2 (1): 47-64.
- Alfiningsih, D. F. 2018. Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di SMK Satria Jakarta. *Skripsi*. Manajemen Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Amborowati, A., dan R. Marco. 2016. Analisis Pengelolaan dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Website Pada SLTP di Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal Ilmia Data Manajemen dan Informasi* 17 (1): 6-14.
- Andi, M., A. R. Murniati, dan N. Usman. (2015). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3 (4).
- Anggraini, M. 2015. Pengaruh Partisipasi (Ta'awun), Transparansi (Balagha), dan Akuntabilitas (Mas'uliyah) Dana BOS SD Negeri di Desa Gajah Mati Terhadap Kinerja (Amaliyah) Sekolah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Palembang.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Cetakan 13. Rineka Cipta. Jakarta
- Barsani, Muchran, dan A. Jaya. 2018. Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Makassar. *Jurnal Profitabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 2 (2): 15-30.
- Bhawa, G. A. S., I. A. Haris, dan M. Artana. 2014. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 4 (1).
- Edusaham.com. 2019. Pengertian *good corporate governance*, prinsip dan Implementasi GCG. <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-good-corporate-governance-prinsip-implementasi-gcg.html>. 30 Desember 2019 (23:17).
- Fauzan. 2014. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Modernisasi* 10 (3): 158-169.

- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Gudono. 2017. *Teori Organisasi*. Edisi keempat. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Hariswati, N. 2015. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS. *Jurnal Ekonomika-Bisnis* 6 (1): 75-88.
- Kaswandi, 2015. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan dan pengembangan pendidikan* 3 (1): 66-74.
- Latifah, H. 2015. Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 11 (2): 12-143.
- Nurhidayah, M., Sarsiti. 2017. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri Sragen *Bilingual Boarding School* (SBBS). *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 5 (1): 34-39.
- Nurjana, W. I. 2018. Pengaruh Penerapan *Good School Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Survei pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Lowokwaru). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. 22 Januari 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56. Jakarta.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER/01/MBU/2011 Tahun 2011 *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. 01 Agustus 2011.
- Rahayu, A., dan E. L. Setianingsih. (2017). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6 (2): 226-239.
- Sapri, A. F. 2017. Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.
- Saputro, B. 2018. Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Evaluasi Perkuliahan Dosen IPA. *Jurnal AKADEMIKA*, 23 (1): 44-56

- Setyowati, S. 2011. Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Studi Situs Di Smp Negeri 1 Wonogiri. *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Silele, E., H. Sabijono, dan R. J. Pusung. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5 (2): 1626-1635
- Sochib. 2016. *Good Corporate Governance Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Grup Penerbitan CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-26. Alfabeta. Jakarta.
- Sulistiyanto, S. 2008. *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. PT Grasindo. Jakarta.
- Sumarni, N. (2015). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 Satap Rambah Samo. *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi*, 2 (1).
- Sutrisna, K., P. S. Kurniawa, & P. E. D. M. Dewi. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Empiris Pada SMA/SMK Negeri Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8 (2): 1-12.
- Sutojo, S., E. J. Aldridge. 2019. *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*. Cetakan Pertama. Penerbitan PT. Damar Mulia Pratama. Jakarta.
- Tribunluwu.com, Belopa. 2016. Dana BOS Untuk SD dan SMP di Kabupaten Luwu Capai 34 Miliar Tiap Tahun, <https://makassar.tribunnews.com/2016/10/03/dana-bos-untuk-sd-dan-smp-dikabupaten-luwu-capai-rp-34-miliar-tiap-tahun>. 17 Nopember 2019 (01:12).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

- Universitas Muhammadiyah Palopo. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cetakan Pertama. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah. Palopo.
- Wahidah, W. 2016. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Pengelolaan Dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Wahyuningsih, T. D. 2016. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Ekonomi . Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Widyatmoko, S., dan Suyatmini. 2017. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemas I Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan* 12 (2): 153-160.